



BULETIN

PARLEMENTARIA

NOMOR: 847/I/2015

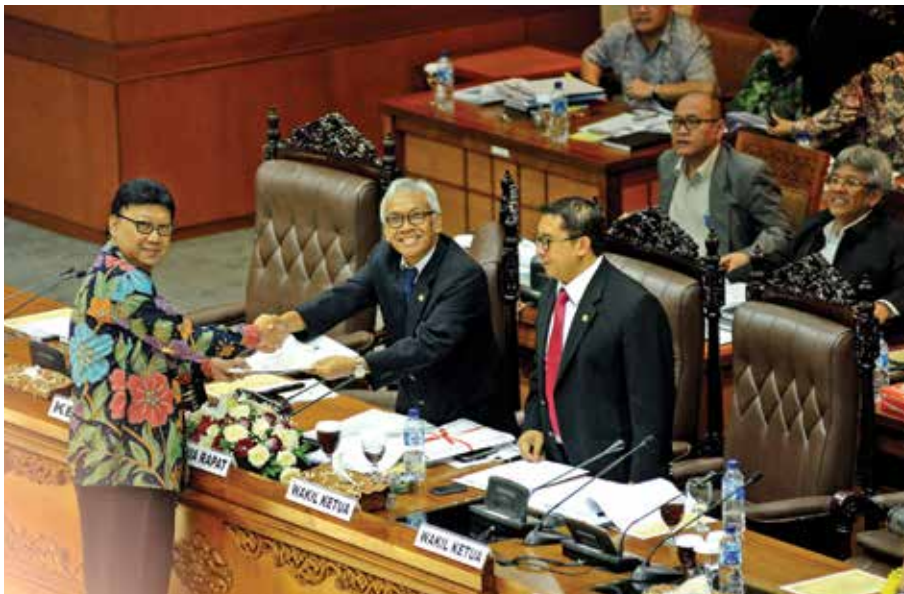
III/JANUARI 2015



PERPPU PILKADA DISETUJUI UNTUK DIREVISI



PERPPU PILKADA DISETUJUI UNTUK DIREVISI



Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto didampingi Fadi Zon berjabat tangan dengan Mendagri saat Rapat Paripurna

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pilkada disetujui DPR namun sepakat untuk selanjutnya direvisi sebelum diberlakukan. Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarul Zaman berharap, dengan disahkannya Perppu ini, DPR meminta Pemerintah untuk sesegera mungkin mengundangkannya, agar proses perbaikan dapat lebih cepat dilakukan.

“Apakah Perppu No.1 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, serta Perppu No.2 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dapat disetujui untuk disahkan menjadi UU,” tanya Wakil Ketua DPR Agus Hermanto saat memimpin Rapat Paripurna DPR, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa, (20/1) dan diikuti kata Setuju.....” sahut anggota dewan serempak, dan palu

diketuk.

Dalam laporan di hadapan rapat Paripurna DPR, Rambe menjelaskan, terdapat kesepakatan, bahwa masih ada permasalahan dalam Perppu No.1 dan 2 Tahun 2014, sehingga memerlukan perbaikan sesegera mungkin dan dengan usul inisiatif DPR RI Komisi II, akan mengajukan RUU perbaikan nantinya, untuk dapat disahkan pada masa sidang sekarang ini.

“Hal ini guna pemenuhan kebutuhan landasan yuridis yang komprehensif dan lebih baik dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah terutama tahun 2015 yang sudah memasuki tahapan persiapan,” kata Rambe.

Oleh karena itu, tambahnya, segera setelah pengesahan Perppu tersebut didalam Rapat Paripurna ini, harus segera diajukan RUU tentang Perubahan atas UU tentang Penetapan Perppu menjadi UU melalui mekanisme yang

berlaku dan sesuai peraturan perundang-undangan. “Dengan demikian akan dihasilkan produk hukum yang lebih baik,” ujarnya.

Pemerintah dalam pandangan yang dibacakan oleh Mendagri Tjahjo Kumolo menjelaskan pemerintah pada dasarnya memahami bahwa semua fraksi-fraksi DPR RI dan Komite I DPD RI memiliki komitmen yang sama dengan pemerintah untuk memberikan persetujuan atas RUU tersebut untuk ditetapkan menjadi UU, dan pemerintah mencatat beberapa usul dan saran pertimbangan untuk penyempurnaan kedepan.

“Mengenai perubahan-perubahan atas materi dalam muatan Perppu No.1 Tahun 2014 yang telah disetujui dan ditetapkan menjadi UU. Salah satunya mengenai tahapan pelaksanaan, penyelesaian sengketa, dampak Pilkada serentak, pemerintah berpendapat, hal ini perlu dibicarakan lebih lanjut. Karena terbatasnya waktu persidangan ini, secara intensif pemerintah membuka diri bersama dengan DPR, sehingga akan secara cepat menyelesaikan perubahan UU ini,” kata Tjahjo.

Perubahan terbatas ini, lanjut Tjahjo, pemerintah menganggap tidak akan mengganggu proses tahapan-tahapan Pilkada yang ditetapkan oleh penyelenggara pemilihan umum Gubernur, Bupati dan Walikota.

“Hal ini mengingat, bahwa pada tahun 2015, terdapat 204 daerah otonom yang akan melakukan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota,” terangnya.

Seluruh Fraksi Setuju

Sebelumnya dalam raker Komisi II, seluruh fraksi menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun Tahun

2014 tentang Pilkada dan Perppu No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemda, yang dikeluarkan Presiden SBY tersebut untuk dijadikan Undang-Undang.

Hal tersebut terungkap saat Komisi II DPR saat Raker dengan Mendagri Tjahjo Kumolo dan Menkumham Yasonna Laoly, di Gedung DPR, Jakarta, (19/1). Raker kali ini mengagendakan pembacaan mini seluruh fraksi di DPR mengenai Perppu tersebut.

“Sehubungan dengan Perppu tersebut, karena masih memiliki kekurangan maka perlu direvisi de-

ngan mengusulkan UU Pilkada dan UU Pemda yang baru diharapkan selesai pada masa persidangan II,” kata Endro Purnomo dari Fraksi Gerindra.

Hal senada disampaikan Komarudin Watubun dari Fraksi PDI-P, di saat yang sama dalam tahapan pelaksanaan Pilkada serentak 2015 memerlukan adanya payung hukum yang lebih memberikan kepastian hukum. Karena itu, Fraksi ini berpendapat, agar penyempurnaan materi Perppu No. 1 Tahun 2014 dilakukan melalui pengusulan RUU baru yang akan melakukan perubahan secara terbatas terhadap

Perppu No. 1 tahun 2014 setelah perppu tersebut disahkan atau di undang-kan menjadi UU.

Fraksi Partai Golkar lewat juru bicaranya Agung Widiantoro, menyetujui Perppu tersebut untuk disahkan menjadi UU, namun Fraksi Golkar dalam pandangan mininya memberikan beberapa hal dalam materi Perppu yang harus direvisi. Tujuh fraksi DPR lainnya juga menyetujui Perppu No.1 dan 2 disahkan menjadi UU dan setuju segera diajukan RUU baru guna merevisi kedua Perppu. (nt) foto:andri/parle/hr

Kemenkes Diminta Terbitkan PP Tenaga Kesehatan



Anggota Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning

Berbagai permasalahan terkait tenaga kesehatan termasuk pendidikan, peningkatan kompetensi, dan penyebaran tenaga kesehatan harus

mendapatkan penanganan dan perhatian yang serius dari Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes).

Untuk itu, Komisi IX DPR minta pemerintah dalam hal ini Kemenkes untuk segera menerbitkan peraturan pelaksana dari UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan UU Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan.

Hal tersebut diusulkan Anggota Komisi IX dari F-PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning dalam rapat kerja Komisi IX dengan Menteri Kesehatan dan Kepala BPJS Kesehatan yang dipimpin Ketua Komisi IX Dede Yusuf Efendi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (21/1/2015).

Segera diterbitkannya Peraturan Pelaksana kedua UU tersebut, kata Ning demikian sapaan akrabnya, seba-

gaimana amanat kedua UU tersebut. Selain itu juga, tukas Ning, untuk melindungi tenaga kesehatan.

“Jumlah dokter kita kurang, giliran perawat mau menolong pasien ditangkap dan ditahan padahal mau menolong rakyat,” tegas Ning.

“Kami (Komisi IX DPR periode 2009-2014) berupaya diujung periode kemarin. UU Tenaga Kesehatan dan UU Keperawatan dimaksudkan agar teman-teman kita tenaga kesehatan dan perawat di daerah-daerah tidak dijadikan inceran aparat, mereka menolong rakyat dengan rasa aman,” tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, Ning juga meminta kepada Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek untuk menutup Rumah Sakit yang tidak pro rakyat.

(sc), foto : naefurodjie/parle/hr.

Komisi IX DPR Kritisi Kinerja BPJS Kesehatan

Anggota Komisi IX DPR mengkritisi kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bidang Kesehatan (BPJS Kesehatan) dalam Rapat Kerja Komisi IX dipimpin Ketua Komisi IX Dede Yusuf Macan Efendi dengan Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek dan Kepala BPJS Kesehatan Fachmi Idris di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (21/1/2015).

Dalam salah satu kesimpulan yang dibacakan Dede Yusuf, Komisi IX meminta BPJS Kesehatan terus melakukan perbaikan pelaksanaan program jaminan kesehatan dengan memperhatikan masukan Anggota Komisi IX.

Salah satunya, kata Dede Yusuf, adalah BPJS Kesehatan diminta meninjau Peraturan Direksi BPJS Kesehatan No-



Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf Macan Efendi

mor 211 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran dan Penjaminan Peserta Perorangan BPJS Kesehatan yang menyebutkan masa berlaku kartu BPJS Kesehatan adalah 7 hari sejak pembayaran iuran pertama khusus untuk kelas III.

Anggota Komisi IX dari F-KB Handayani mengkritisi sulitnya mengakses BPJS Kesehatan. Ia mengharapkan kemudahan mengakses BPJS Kesehatan terutama bagi peserta mandiri.

Anggota Komisi IX dari F-PP Okky Asokawati mengkritik BPJS Kesehatan yang ikut menentukan harga obat. Ia juga mempertanyakan ketika pasien BPJS naik ke kelas yang lebih tinggi, selisih apa yang dibayar pasien, apakah untuk ruang rawat inapnya atau juga obatnya.

Okky mengusulkan BPJS Kesehatan melakukan sosialisasi yang lebih gencar dengan menggandeng seluruh pihak termasuk Anggota Komisi IX DPR.

Anggota Komisi IX dari F-Hanura Djoni Rolindrawan menyatakan BPJS Kesehatan masih jauh dari harapan. Menurut petugas kesehatan Tingkat I masih banyak yang belum mengerti, pasien yang datang ke Puskesmas langsung dirujuk ke Rumah Sakit, akhirnya Rumah Sakit jadi penuh

berbeda dari tujuan awal BPJS Kesehatan.

Ia juga mengkritisi prinsip probabilitas sebagaimana Pasal 2 UU BPJS dimana setiap peserta dapat berobat di semua fasilitas kesehatan dan dimana saja. Kenyataannya tidak.

Sependapat dengan Djoni, Anggota Komisi IX dari F-PG Dewi Asmara menyatakan RSUD di daerah saat ini menjadi Puskesmas Raksasa.

Dewi juga meminta BPJS Kesehatan untuk memastikan tidak ada tumpang tindih antara peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN dengan peserta Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Sementara teman satu fraksi Dewi, Charles Mesang meminta BPJS Kesehatan melakukan komunikasi yang intensif dengan fasilitas kesehatan milik swasta sehingga ada peningkatan partisipasi dari pihak swasta. Pasalnya saat ini, tidak semua Rumah Sakit Swasta dapat menerima pasien peserta BPJS.

Sedangkan, Anggota Komisi IX dari F-PAN Hang Ali Saputra Syah Pahan adanya partisipasi yang tinggi untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan harus dijadikan momentum untuk peningkatan pelayanan dan percepatan pencapaian *universal coverage*. (sc) foto : naefurodje/parle/hr.

Raker Komisi II DPR dengan MenPAN-RB Hasilkan Enam Kesimpulan



Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarulzaman berdialog dengan MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi

Rapat Kerja Komisi II DPR dengan MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (21/1) hasilkan enam kesimpulan, yaitu, pertama, Komisi II DPR mendukung rencana strategis Kementerian PAN-RB Tahun 2015-2019.

“Dan agar tetap menjaga program kerja berjalan pada jalurnya, Komisi II DPR akan tetap mengawasi jalannya rencana dimaksud. Oleh karena

itu, Komisi II DPR dan Pemerintah bersepakat untuk tetap membangun komunikasi yang baik,” lanjut Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarul Zaman saat membacakan kesimpulan rapat.

Kedua, Komisi II DPR mendorong Revolusi Mental Birokrasi dilaksanakan secara structural dan kultural. Oleh karena itu, Komisi II DPR mendorong Kementerian PAN-RB menjadi motor terlaksananya Revolusi Mental dika-

langan birokrasi terutama dari pejabat pimpinan tinggi.

Ketiga, Komisi II DPR mengapresiasi terobosan-terobosan di lingkungan birokrasi yang dilakukan oleh Pemerintah, untuk itu Komisi II DPR meminta agar hal tersebut dilakukan secara konsisten selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keempat, Komisi II DPR mendukung penuh upaya Reformasi Manajemen ASN yang dilakukan oleh Kementerian PAN-RB serta mendorong untuk mempercepat penyelesaian peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan UU No.5 Tahun 2014 Tentang ASN baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Presiden dan dikomunikasikan dengan Komisi II DPR.

Kelima, Komisi II DPR meminta Pemerintah agar kebijakan moratorium dikaji ulang dengan mendasarkan pada data yang valid dan mempertimbangkan kondisi riil di masyarakat.

Dan keenam, terhadap tenaga honorer K2 yang dinyatakan tidak lulus, Komisi II DPR meminta kepada Kementerian PAN-RB untuk segera memberikan sikap yang tegas, disertai dengan solusi dan kebijakan yang bersifat aplikatif termasuk penganggaran, dan selesai ditahun 2015. (nt) foto : rizka/parle/hr

Komisi VII DPR Akan Bentuk Panja Ketenagalistrikan

Komisi VII DPR akan membentuk Panja kelistrikan guna menelusuri kendala di sektor kelistrikan. “Seperti diketahui target 10 ribu MW masih belum tercapai sampai saat ini, karena itu PLN harus lebih keras lagi tidak hanya menyurati tetapi menegur agar proyek ini segera tuntas,” ujar anggota Komisi VII DPR Agus Sulistyono (Fraksi PKB) saat RDP dengan Dirjen Ketenagalistrikan yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR Zairullah Azhar, di Gedung Nusantara, Rabu, (21/1).

Menurutnya, pemerintah harus mensejajarkan persoalan kelistrikan karena target pemerintahan Jokowi yaitu sebesar 35 ribu MW kedepannya. “Ini bukan anggaran kecil dan tidak sedikit, harus segera ditangani oleh kementerian,” paparnya.

Dia menambahkan, proyek 10 ribu MW itu sudah dimulai sejak tahun



Wakil Ketua Komisi VII DPR Zairullah Azhar

2006 namun belum terealisasi sejak sekarang dan selalu alasannya klasik. “Kita meminta Panja Kelistrikan 10 ribu MW tahap I dan II ditelusuri dimana saja persoalan yang dihadapi oleh Pemerintah,” jelasnya.

Dia mengatakan, pemerintah harus-

nya jangan terburu-buru bermimpi mencapai 35 ribu MW karena yang harus segera dituntaskan yaitu poryek listrik 10 ribu MW tahap I dan II.

Sementara, anggota Komisi VII DPR Mustofa Assegaf (Fraksi PPP) mengatakan, dirinya ingin melihat langkah nyata pemerintah dalam meningkatkan rasio elektrifikasi. “Kita ingin lihat skala prioritas apa yang akan diberikan untuk meningkatkan rasio ini,” jelasnya.

Menurutnya, perlu langkah kongkret untuk program elektrifikasi di pedesaan. Artinya sudah tidak jaman lagi listrik belum terelekrifikasi di Pulau Jawa. “Jadi target apa yang ditetapkan untuk 2015? sekarang ini sudah tidak jamannya lagi tidak ada listrik apalagi di pulau Jawa,” ujarnya. (Si), foto : naefu-rodjie/parle/hr.

DPR Kritisi 39 Temuan di Kementerian PU dan Perumahan Rakyat

Sejumlah anggota Komisi V DPR mengkritisi hasil Hapsem BPK RI Semester I tahun 2014-2015 terkait Pekerjaan Umum yang masih menyisahkan 39 temuan diantaranya soal aset negara yang belum disertifikasi.

“Kita mencermati tiga hal krusial yang harus dibenahi dalam Hapsem BPK RI Semester I tahun 2014-2015 terkait pekerjaan umum,” ujar anggota DPR Rendy Lamadjido dari Fraksi PDIP, saat Raker dengan Menteri PU dan Perumahan Rakyat M. Basuki Hadimuljono, dipimpin oleh Ketua Komisi V DPR Fary Djemi Francis, di Gedung Nusantara, Rabu, (21/1).

Hal pertama, lanjutnya, masih adanya persoalan SDM yang belum memadai dalam menyikapi hasil temuan BPK. “Kalau kita melihat faktanya kerap ada beberapa Satuan Kerja (Satker) penyusutan aset ternyata banyak aset yang rusak dan nilai nol tapi masih dimasukkan didalam SIMAK BMN,” katanya.

Dia menambahkan, pihaknya merasa heran bahwa dalam proses lelang



Anggota Komisi V DPR Rendy Lamadjido

tender yang diatur UU maupun pemerintah itu wajib hukumnya mencantumkan harga perkiraan sendiri. “Faktanya dokumen tender tidak dicantumkan padahal kita sudah lama menganut asas transparansi. Jadi wajib hukumnya harga perkiraan sendiri ternyata didalam temuan BPK Satuan Kerja (Satker) belum mencantumkan itu,”

terangnya.

Dirinya berharap Menteri PU dan Perumahan Rakyat memiliki keseriusan dalam menanggapi hasil laporan BPK. “Ini sangat penting dalam menanggapi aset negara jangan sampai melanggar UU No.1 thn 2004 tentang Perbendaharaan negara, bahwa barang milik negara atau tanah harus disertifikasi oleh negara. Ini berulang-ulang kejadiannya banyak aset negara yang hilang dan tidak disertifikasi,” jelasnya.

Sementara, anggota DPR Abdul Hakim (Fraksi PKS) mengharapkan, Kementerian PU dan Kemenpera dapat mencatat seluruh aset tanah dan bangunan yang dimilikinya. “Ini sangat penting sekali untuk mencatat karena faktanya banyak yang hilang dan beralihnya aset negara,” ungkapnya.

Dia menambahkan, dari 39 temuan ini masih sedikit sekali bila dilakukan audit kinerja. “Bahkan saya prediksi bisa ribuan temuan jika ada audit,” jelasnya. (Si), foto : rizka/parle/hr.

Realisasi Anggaran Kemensos 2014 Melebihi Pagu



Pimpinan Komisi VIII saat Raker dengan Mensos

Komisi VIII DPR RI mempertanyakan laporan Menteri Sosial, Khofifah Indarparawansa terkait realisasi anggaran Kemensos yang melebihi Pagu Anggaran 2014 yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal tersebut terungkap dalam rapat kerja Mensos dengan Komisi VIII, Kamis (22/1) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

“Pagu Anggaran Kemensos pada tahun 2014 sebesar 7,68 Triliun yang kemudian mendapat pemotongan anggaran sebesar 999,35 Miliar. Sementara dalam laporan Mensos Pagu anggaran Kemensos 2014 sebesar 13,39 Triliun dengan realisasi anggaran Kemensos tahun 2014 sebesar 13,032 Triliun. Bagaimana ini bisa terjadi, anggaran mana yang digunakan oleh Kemensos,” tanya Ketua Komisi VIII, Saleh Partaonan Daulay.

Dilanjutkannya, bahkan rincian penggunaan anggaran 2014 Kemensos pun tidak sesuai dengan RKA-KL (Rencana Kerja Anggaran-Kementerian/Lembaga) yang telah disepakati DPR dengan Kemensos sebelumnya. Sebut saja program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kemensos sebesar Rp177,77 miliar yang telah disepakati sebelumnya, dalam laporannya Kemensos mencantumkan anggaran untuk program tersebut sebesar 184,48 Miliar dengan realisasi anggaran sebesar 174,74 Miliar.

Menjawab hal tersebut Khofifah mengungkapkan Kemensos menggunakan anggaran BA BUN (Bagian Anggaran Bendaharawan Umum Negara 999,08) hal tersebut sesuai dengan UU No.23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan BELANJA Negara Tahun 2014, pasal 17.

Menanggapi hal tersebut pimpinan dan sejumlah anggota Komisi VIII mengatakan bahwa UU No.23 Tahun 2013 itu telah diamandemen melalui UU No.12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014.

“Adanya UU No.12 tahun 2014 yang merupakan produk UU terbaru, maka otomatis UU lama yakni UU No.23 Tahun 2013 sudah tidak berlaku lagi. Dengan demikian landasan hukum yang digunakan Kemensos tersebut tidak tepat. Jika Kemensos menggunakan Inpres atau Perpres sebagaimana yang disebutkan, maka produk hukum yang tertinggi adalah undang-undang,” papar Politisi dari Dapil Sumatera Utara II ini. (Ayu) foto: andri/parle/hr

Komisi X Harapkan Kemenpora Komunikasi Dengan PSSI

Persetujuan antara Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia terus mendapat perhatian dari masyarakat luas. Tak terkecuali juga dari Komisi X. Komisi yang merupakan mitra kerja Kemenpora ini pun tak henti-hentinya menyorotinya.

Untuk mengetahui permasalahannya, pekan lalu Komisi X juga sudah mengundang PSSI. Dan pada kesempatan rapat kerja pertama kalinya dengan Menpora Imam Nahrawi, Selasa (20/01/2015), Komisi X berharap Menpora dapat berkomunikasi dengan PSSI, dan mencari solusi dari berbagai permasalahan yang terjadi.

“Kami masih berharap pihak Kemenpora dengan pihak PSSI bisa bertemu langsung. Kita berharap mereka bisa berkomunikasi dengan kepala dingin,

bisa mencari solusi dan tentunya untuk perbaikan persepakbolaan nasional,” kata Ketua Komisi X Teuku Riefky Harsya, saat ditemui di sela-sela rapat, di Ruang Rapat Komisi, Gedung Nusantara I.

Politisi Demokrat ini melihat, semenjak Menpora Imam Nahrawi dilantik belum ada pertemuan antara Menpora dengan PSSI. Polemik semakin meruncing ketika Menpora membentuk Tim Sembilan, untuk melakukan evaluasi terhadap PSSI.

“Kami merasa bahwa Tim 9 itu belum perlu dibentuk. Tetapi karena itu memang hak dari Menteri untuk membentuk tim apa pun namanya, kami persilahkan saja. Tetapi komunikasi dengan pihak PSSI itu lebih baik secara langsung, tidak perlu perantara,” imbuhnya.

Politisi asal Dapil Aceh I ini menambahkan, jika permasalahan ini berlarut-larut tak kunjung selesai, pihaknya siap memfasilitasi pertemuan kedua belah pihak. Apalagi, jika persetujuan ini tak segera mereda, berimbas kepada PSSI sendiri yang bisa saja dibekukan oleh FIFA. Sehingga ini dapat mengganggu persepakbolaan nasional.

“Kalau memang mereka (Menpora dan PSSI) tidak bisa berkomunikasi tentu kami siap memfasilitasi pertemuan. Jika permasalahan ini sudah menjadi perhatian publik, sehingga kami sebagai wakil rakyat, mendengar aspirasi masyarakat agar masalah ini segera di selesaikan. Bila diperlukan kami akan turun tangan,” tambah Riefky.

Hal senada diungkapkan oleh Anggota Komisi X Jefirstson Riwu Kore.

la menilai, jika sampai Indonesia mendapat sanksi dari FIFA, akan sangat merugikan dunia sepakbola Indonesia. Bahkan, jika sampai PSSI dibekukan, akan sulit untuk menghidupkannya lagi.

“Kami meminta Menpora supaya bijak, agar membuka komunikasi dengan PSSI. Jangan tiba-tiba membentuk Tim Sembilan. Pembentukan Tim Sembilan ini terlalu cepat, terkesan seperti intervensi. Tidak diskusi juga dengan PSSI,” kata Jefirstson.

Menanggapi sorotan Komisi X terhadap persetujuan Kemenpora dengan PSSI, Menpora Imam Nahrawi berjanji



Anggota Komisi X DPR Jefirstson Riwu Kore

akan bertemu dengan pihak PSSI, Kamis (22/01/2015) esok.

“Kami akan memanggil PSSI, Kamis (22/1). Tujuan kami membentuk Tim Sembilan adalah untuk membuat mereka lebih baik, bukan melakukan intervensi,” janji Imam.

Sedianya, raker yang berlangsung hingga pukul 23.30 WIB malam itu mengambil keputusan terkait hasil rapat. Namun terkendala poin yang membahas Tim Sembilan. Sehingga, rapat kerja akan kembali dilanjutkan pekan depan, untuk mengambil keputusan. (sf), foto : naefurodjie/parle/hr.

Perjanjian Ekstradisi dengan Vietnam dan PNG Dibahas



Anggota Komisi I DPR TB Hasanudin

Komisi I DPR dipimpin Wakil Ketua Tantowi Yahya menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham membahas Pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Ratifikasi Perjanjian ekstradisi RI-Papua New Guinea dan Perjanjian Ekstradisi RI-Vietnam di ruang rapat Komisi I DPR, Rabu (21/1).

Dalam acara ini Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Harkristuti Harkrisnowo mengatakan, Perjanjian Ekstradisi antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Vietnam dan Papua New Guinea merupakan wujud dari

komitmen Indonesia sebagai bagian dari masyarakat Internasional dalam rangka meningkatkan efektifitas kerja sama internasional.

Perjanjian ekstradisi ini dimaksudkan guna menanggulangi dan memberantas kejahatan lintas batas, dengan menghadirkan tersangka atau terpidana yang pada saat bersamaan juga dapat menguatkan upaya pengembalian aset hasil kejahatan.

“Pengesahan Perjanjian Ekstradisi RI – Papua New Guinea maupun RI – Vietnam akan menjadi payung hukum kerja sama di bidang ekstradisi yang efektif sehingga permintaan ekstradisi dari Pemerintah Indonesia yang telah dikirimkan sebelumnya dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Papua New Guinea maupun Vietnam,” ungkapny.

Menurutnya, upaya pemulangan kedua terpidana yaitu Joko Tjandra dan Samadikun Hartono, ke wilayah yurisdiksi Republik Indonesia melalui mekanisme ekstradisi sangat penting dalam upaya penegakan hukum di Indonesia.

Selain itu, pemulangan kedua terpidana ke Indonesia juga memberikan kemudahan bagi aparat penegak hukum di Indonesia untuk dapat merampas harta kekayaannya yang berasal dari kejahatan, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri.

Aparat penegak hukum di Indonesia dapat melakukan pelacakan, pembekuan, perampasan, dan pengembalian aset dimaksud ke Indonesia. “Hal ini sangat sejalan dengan semangat dan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia,” ujar Harkristuti.

Anggota Komisi I DPR TB Hasanudin mengatakan, seorang pajurit di Indonesia jika mencuri di tempat umum bukan di asrama TNI, tetap saja dihukum di Pengadilan Militer dan tidak diadili di Pengadilan Umum seperti di negara-negara lain termasuk Vietnam.

Karena itu dia mempertanyakan, apakah jika prajurit dari Indonesia melarikan diri ke Vietnam, dan meminta perlindungan, apakah bisa diekstradisi. “Pasalnya sebagai seorang militer di Indonesia hanya menganut Hukum Tindak Pidana Militer, bagaimana dengan sistem hukum negara itu,” kata Hasanudin. (Spy), foto : andri/parle/hr.

PUIC Kutuk Aksi Charlie Hebdo

Parliamentary Union of OIC Member States (PUIC), melalui Komite Politik dan Hubungan Luar Negeri, mengutuk keras aksi Charlie Hebdo dalam menerbitkan dan mencetak ulang karikatur Nabi Muhammad SAW. Langkah Majalah satir Charlie Hebdo asal Perancis tersebut menurut PUIC bukan merupakan bagian dari kebebasan berekspresi apabila dilakukan hanya untuk menista sebuah agama.

Respon keras tersebut dikeluarkan oleh Komite Politik dan Hubungan Luar Negeri, Senin (19/1), merespon tragedi yang muncul beberapa pekan belakangan ini. Kendati demikian, menurut Komite tersebut, aksi-aksi kekerasan dan pembunuhan atas dasar apapun tidak bisa dibenarkan.

“Perlu ada pesan yang kuat bahwa membuat kartun (untuk mengolok-olok) agama lain yang di negara mereka tidak mendapat masalah, bukan berarti dapat membikin (seenaknya) olok-olok tentang agama lain itu di luar wilayah mereka,” kata Wakil Ketua BKSAP, Rofi Munawar di Istanbul, Turki.

Delegasi Indonesia dipimpin Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menghadiri rangkaian persidangan komite PUIC dan juga Konferensi ke-10 PUIC yang dibuka Rabu (21/1). Para delegasi yang terdiri dari Meutya Hafidz (Wakil Ketua BKSAP), Rofii Munawar (Wakil Ketua

BKSAP), Biem Triani Benyamin (Anggota BKSAP/F Gerindra), dan Prananda Surya Paloh (Anggota BKSAP/F Nasdem), mengikuti rangkaian persidangan komite dengan Indonesia sebagai anggotanya seperti di Komite Politik dan Hubungan Luar Negeri, Komite HAM, Perempuan dan Keluarga, maupun Konferensi ke-4 Anggota Parlemen Perempuan PUIC.

Beberapa Komite telah bersidang sejak Sabtu (16/1) hingga Senin (19/1) dan menyelesaikan tugasnya dengan menghasilkan sejumlah resolusi, seperti di Komite Politik dan Luar Negeri yang menghasilkan sedikitnya 25 resolusi menyikapi beragam isu terkait dunia Islam, terorisme, Palestina, kebebasan berekspresi, hingga respon terkini soal Charlie Hebdo.

Di Komite HAM, Perempuan dan Keluarga sedikitnya 10 resolusi terkait upaya negara OKI terkait HAM, penguatan peran perempuan, mencegah eksploitasi perempuan, penguatan posisi pemuda, hingga peran PUIC dalam hal mendukung kesehatan dasar menjadi keputusan dari para anggota komite tersebut.

Di Konferensi ke-4 anggota Parlemen Perempuan PUIC, Senin (19/1), tiga agenda dibahas, yakni terkait peran perempuan dalam memecahkan masalah dan konflik, melindungi perempuan dan anak-anak Palestina,



Wakil Ketua BKSAP DPR Meutya Hafidz

hingga mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak terjadi.

“Dalam konteks pemecahan masalah, wanita harus berada dalam posisi yang dapat memutuskan. Artinya perlu ada di wilayah *decision-center making*. Untuk itu partisipasi politik, termasuk kuota 30% dalam daftar legislatif menjadi langkah tegas Indonesia dalam mendukung peran perempuan dalam pemecahan masalah,” ujar Wakil Ketua BKSAP, Meutya Hafidz dalam sesi Konferensi ke-4 anggota Parlemen Perempuan PUIC. (BKSAP/mh). foto : iwan armanias/parle/hr.

Semua Lembaga Perlu Jaga Kualitas Komunikasi



Anggota Komisi III DPR Ruhut Sitompul

Politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul menyampaikan komentar menarik, berkaitan dengan kasus Komjen Budi Gunawan (BG) yang diputuskan rapat paripurna DPR sebagai Kapolri baru menggantikan Jenderal Sutarmanto namun pengangkatannya ditunda. Berita tersebut makin ramai akhir-akhir ini dan cenderung semakin ruwet. Anggota Komisi hukum DPR ini mengatakan bahwa kasus tersebut semula berawal dari DPR.

“Soal kasus BG karena baru pertama, kita tidak usah saling menyalahkan. Itu semula berawal dari DPR juga, kenapa awal-awal kita pecah kongsi. Pecah

kongsi itu dimanfaatkan dan sekarang sudah bersatu lagi, sudah bagus, sudah kembali ke jalan yang benar. Yang penting semua lembaga kualitas komunikasi dijaga,” kata Ruhut kepada pers Selasa (20/1) siang.

Menurut Ruhut, karena dewan pecah kongsi, mengakibatkan kualitas komunikasi kita kurang. Begitu juga kepada KPK dan juga kepada lembaga lain. “Peristiwa ini perlu diambil hikmahnya. Di mata kami Pak Budi Gunawan orangnya baik. Buktinya di jaman SBY dia dapat tiga jabatan strategis, naik pangkat bintang tiga bukti baik,” ujarnya.

Menanggapi munculnya gagasan untuk mengajukan interpelasi kepada Presiden terkait pencalonan Budi Gunawan, Ruhut mengatakan, dalam istilah peperangan “Belanda masih jauh”.

Kalau Demokrat menurutnya, tidak membiasakan diri ngomong begitu.

Yang penting tambah Ruhut, kita butuh polisi. Kalau tidak ada polisi bagaimana. Karena itu jangan dijadikan

polisi pemadam kebakaran, polisi bertugas menegakkan Kamtibmas. Meski demikian, kita juga harus dukung KPK karena rakyat miskin karena ulah koruptor. (mp), foto : narfurodjie/parle/hr.

DPR Minta Langkah Konkret Tangani Palestina

DPR mendesak *Parliamentary Union of OIC Member States* (PUIC) agar menghasilkan langkah konkret untuk mendukung kemerdekaan Palestina dengan Al-Quds sebagai ibu kotanya. Desakan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, saat mengikuti sidang ke lima Komisi Palestina PUIC, yang digelar di Istanbul, Turki, Sabtu (17/1).

Komisi Palestina adalah komisi khusus yang dibentuk oleh PUIC untuk membahas isu-isu spesifik terkait Palestina dengan hanya 17 anggota. Kali ini, Komisi Palestina bersidang beberapa hari sebelum PUIC secara resmi memulai agenda konferensi ke-10-nya, Rabu (21/1).

“Sebagian besar peserta rapat bicara tentang aksi nyata, aksi konkret, dan tindak lanjut resolusi, tetapi tidak ada kejelasan apa saja aksi yang nyata itu,” ungkap Fahri, mengomentari argumen Indonesia mendorong aksi konkret mendukung Palestina. Salah satu hal yang menurut Fahri cukup konkret dan dapat dilakukan oleh seluruh anggota PUIC adalah dengan mendirikan perwakilan diplomatik Palestina di negara masing-masing.

Dengan memiliki hubungan diplomatik dengan Palestina, negara-negara berpenduduk muslim di dunia kian menegaskan dukungannya terhadap kemerdekaan Palestina, sekaligus menyuarakan penolakannya terhadap agresi Israel yang berkepanjangan. “Indonesia telah sejak dulu mendirikan bahkan membiayai secara penuh perwakilan diplomatik Palestina di Indonesia,” ungkap Fahri.

Dalam persidangan tersebut, Uni Emirat Arab muncul dengan usulan yang cukup realistis yakni dengan membentuk komite *ad-hoc* yang bertugas menindaklanjuti realisasi resolusi-resolusi terkait Palestina. Komisi Palestina juga mempertegas perlunya agenda memperluas sikap parlemen terkait dukungan terhadap kemerdekaan dan kedaulatan Palestina.

Penegasan tersebut dipicu langkah progresif yang dilakukan sebagian parlemen negara-negara Eropa yang memberikan mosi mendukung Palestina, seperti yang



Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah

terjadi di Inggris, Perancis, maupun Swedia. “Indonesia dengan senang hati ingin menjadi bagian dari komite ad-hoc tersebut untuk memastikan semua usulan menjadi sesuatu yang konkret bagi saudara-saudara kita di Palestina,” Fahri menawarkan.

Komisi Palestina juga mencatat beberapa perkembangan situasi di Palestina seperti adanya rencana partisi Parlemen Israel untuk membagi Al-Quds menjadi dua wilayah ibadah, yakni untuk Yahudi dan muslim.

Catatan lain, adanya serangkaian aksi Israel membatasi warga Palestina beribadah di Al-Quds hingga langkah-langkah Palestina untuk bergabung ke dalam 16 instrumen legal internasional, termasuk mengaksesi Statuta Roma untuk Pengadilan Kriminal Internasional (*International Criminal Court*). Dengan bergabung ke ICC, Palestina bertekad membawa kejahatan internasional yang dilakukan Israel ke hukum internasional. (BKSAP/mh) foto : naefurodjie/parle/hr.

Anggota Komisi VIII Pertanyakan Kinerja Menteri PPPA

Anggota Komisi VIII DPR RI, Rahayu Saraswati Djoyohadikusumo mempertanyakan kinerja Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak sebagai Ketua harian

gugus Pencegahan dan penanganan TPPO atau Tindak Pidana Perdagangan Orang.

“Saya mendapat pengaduan bahwa program dari gugus



Anggota Komisi VIII DPR Rahayu Saraswati Djojohadikusumo

harian pencegahan dan penanganan TPPO ini tidak jalan, selain itu pertemuan hanya setahun sekali, bagaimana ini bisa

jalan,” tanya Sara, begitu ia biasa disapa, saat rapat kerja dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise, Selasa (20/1) di ruang rapat Komisi VIII, Senayan Jakarta.

Sara menjelaskan, ia kerap mendapat masukan dari para TKW (Tenaga Kerja Wanita) di luar negeri dimana setiap ada permasalahan mengenai TKW, pemerintah bukannya membela hak-hak TKW malah terkesan berada di pihak yang berseberangan dengan TKW. Oleh karena itu ia berharap ke depan pemerintah dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menaungi masalah perempuan termasuk TKW untuk lebih proaktif melindungi hak-hak perempuan termasuk TKW yang berada di luar negeri.

Selain itu ia juga menyoroti permasalahan *shelter* bagi anak-anak yang menjadi korban *human and child trafficking* atau perdagangan manusia. Pasalnya ia mendapat masukan dari Komnas Perlindungan Anak, bahkan dari kepolisian yang membebaskan anak yang sempat didagangkan sejak usia 8 hingga usia 12 tahun. Namun setelah dibebaskan, mereka tidak mengetahui bagaimana selanjutnya anak tersebut.

“Dari sini saya berharap agar Kementerian PP dan PA ini dapat membuat *shelter* di seluruh wilayah Indonesia untuk memberi perlindungan bagi anak-anak yang menjadi korban perdagangan manusia,” harap Politisi dari Fraksi Partai Gerinda Dapil Jawa Tengah IV. (Ayu), foto : andri/parle/hr.

Fadli Zon Tetapkan Trimedya Waka Komisi III

Pimpinan Komisi III DPR RI bertambah satu orang yaitu posisi wakil ketua, yang dijabat oleh politisi Fraksi PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan. Upacara penetapan dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Bidang Korpolkam Fadli Zon.

“Menetapkan Trimedya Panjaitan sebagai Wakil Ketua Komisi III, apakah hal ini dapat disetujui?” tanya Fadli kepada seluruh peserta sidang di ruang rapat Komisi III, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (20/1/15).

Ia juga menjelaskan penambahan satu orang pimpinan komisi bidang hukum dan keamanan ini berdasarkan perubahan pasal 97 ayat 2 UU MD3. “Pimpinan komisi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota komisi dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.”

Sidang penetapan ditutup dengan penyerahan secara resmi palu sidang dari Pimpinan DPR kepada Pimpinan



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon memberikan selamat kepada Pimpinan Komisi III baru Trimedya Panjaitan

Komisi III. Penetapan ini melengkapi karir politik Trimedya Panjaitan yang pada periode 2004-2009 pernah men-

jabat sebagai Ketua Komisi III.

Pada bagian lain Fadli menyebut dengan penyesuaian ini perbedaan

pandangan karena latar belakang koalisi-koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat, sudah berakhir. “Semua sudah mencair, sekarang kita kedepankan kinerja,” tekan Politisi FP Gerindra ini usai rapat.

Dengan demikian jajaran Pimpinan Komisi III menjadi Ke-

tua; Aziz Syamsudin (FPG), Wakil Ketua; Desmon J. Mahesa (FP Gerindra), Benny K. Harman (FPD), Mulfahri Harahap (FPAN) dan Trimedya Panjaitan (FPDIP). (iky)/foto:andri/parle/iv.

Junimart Girsang: MKD Akan Bersinergi

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menetapkan anggota Fraksi PDI Perjuangan Junimart Girsang sebagai Wakil Ketua Majelis Kehormatan Dewan - MKD DPR RI. Penetapan ini berdasarkan revisi UU tentang MD3 pasal 121 ayat 2 yang mengubah komposisi pimpinan menjadi satu ketua dan 3 wakil ketua.

“Ini tugas berat saya rasa menjaga marwah dan kehormatan DPR. Saya yakin kalau dikerjakan bersama akan bisa dilaksanakan, jadi kita di MKD akan bersinergi,” kata Junimart usai acara penetapan di ruang rapat MKD, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/1/15).

Ia menjelaskan banyak hal yang akan menjadi perhatian MKD salah satunya adalah masalah kehadiran anggota dewan. Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini menekankan MKD nantinya tidak hanya menyoroti kehadiran dalam sidang paripurna tetapi juga pada rapat alat kelengkapan dewan.

Dengan penetapan ini berarti pimpinan MKD adalah Ketua; Surahman Hidayat (FPKS), tiga wakil ketua yaitu Lili Asjudiredja (FPG), Sufmi Dasco Ahmad (FP Gerindra) dan Junimart Girsang (FPDIP). Sedangkan anggota MKD berdasarkan UU MD3 adalah tujuh belas orang.



Wakil Ketua DPR Fadli Zon memberikan selamat kepada Junimart Girsang sebagai Wakil Ketua MKD

Usai upacara penetapan yang berlangsung khidmat dan singkat itu, pertemuan dilanjutkan dengan rapat internal yang berlangsung tertutup. “Mohon yang tidak berkepentingan meninggalkan ruangan karena rapat akan dilanjutkan dan sifatnya tertutup,” demikian Surahman. (iky) foto: naefurodji/parle/hr

Komisi V DPR Akan Bentuk Panja Penerbangan Nasional

Sejumlah Anggota Komisi V DPR yang membidangi perhubungan mendukung dibentuknya Panja keselamatan transportasi dan penerbangan nasional yang bertujuan melakukan review peraturan terkait penerbangan.

“Berdasarkan rekomendasi dari *International Civil Aviation Organization* (ICAO) industri penerbangan tidak ada masalah, yang bermasalah itu adalah *law enforcement* (penegakan hukum) karena itu saya meminta dibentuk Panja penerbangan yang bertujuan tercapainya *zero accident*,” ujar Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PDIP Rendy M. Affandy Lamadjido saat Raker dengan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, di Gedung Nusantara, Selasa, (20/1).

Melalui Panja ini nanti, lanjut Rendy, dapat ditelusuri peraturan apa yang masih lemah dan harus dibenahi. “Jadi ini bukan mencari siapa yang salah tetapi pembentukan Panja ini bertujuan untuk kemaslahatan penerbangan Indonesia, jadi apabila ada masalah langsung dibenahi,” lanjutnya.

Menurut Abdul Hakim (Fraksi PKS), berdasarkan ICAO yang harus dibenahi dalam industri penerbangan yaitu, Kelembagaan, lisensi, operasi pesawat, investasi dan bandar udara. “Ini diperlukan audit komprehensif terkait laporan ICAO, karena yang sudah cukup biak yaitu kelaikan pesawat dan navigasi,” jelasnya.

Dia menambahkan, masih perlu dibenahi soal ijin, semen-



Ketua Komisi V DPR berdialog dengan Menteri Perhubungan

tara untuk *low cost carrier* tentunya tidak boleh mengabaikan sisi keamanannya. “Kami setuju segera dibentuk Panja terkait penerbangannya agar lebih komprehensif dalam melakukan evaluasi,” jelasnya. (Si), foto : riska arinindya/parle/hr.

Kerja Sama IT dengan Korsel Perlu Ditingkatkan Lagi



Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto menerima Delegasi Parlemen Korea Selatan

Delegasi Parlemen Korea Selatan dipimpin Ketua Komisi Hukum Sang Min Lee didampingi dua anggota dan perwakilan Kedubes negara itu mengadakan pertemuan dengan Wakil Ketua DPR Agus Hermanto, Selasa (20/1) sore di Ruang Pimpinan Gedung DPR Senayan, Jakarta. Selain dibahas kerja sama dua negara, juga peningkatan hubungan kedua negara termasuk hubungan DPR dan Parlemen Korsel.

Menurut Agus, kerja sama teknologi dan informasi kedua negara sudah dijalin. Korea dikenal sangat unggul khususnya Samsung bagaimana hebatnya, bahkan HP dari negeri itu betul-betul unggul dan kita berkeinginan kerja sama itu lebih ditingkatkan lagi.

“Kenapa sih Samsung tidak bikin pabrik di Indonesia, rasanya akan menjadi kebanggaan. Mungkin namanya apa Samsung Krawang atau

Tangerang,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu Agus menjelaskan bahwa di Indonesia tidak dikenal adanya partai oposisi melainkan partai penyeimbang yang dinilai hal baru bagi Parlemen Korsel. “Kami bukan partai koalisi dan juga bukan partai oposisi, tetapi penyeimbang. Manakala kebijakan pemerintah sejalan dengan kepentingan partai dan kepentingan rakyat, PD harus paling depan mendukung. Namun sebaliknya kalau kebijakan pemerintah tidak sejalan dengan kepentingan rakyat, PD juga paling depan menolaknya,” jelas tokoh senior Partai Demokrat tersebut.

Saat ditanyakan bahwa Wakil Ketua DPR Agus Hermanto disebut sebagai sahabat sejati oleh Ketua Komisi Hukum Parlemen Korsel, dia menyatakan karena sudah sering ke Korea paling tidak sudah 15 kali berkunjung ke negeri Ginseng itu. Dia juga pernah menjabat Ketua Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR dengan Parlemen Korsel dan sebelum menjadi anggota DPR sudah sering ke negeri itu. (mp)/foto: iwan armanias/parle/iw.

Tinjau Ulang Penugasan Babinsa Sebagai Penyuluh Pertanian

Menyusul pengerahan para personel Bintara Pembina Desa (Babinsa) sebagai penyuluh pertanian di desa-desa, kritik pun dilayangkan para anggota DPR. Para Babinsa dinilai tidak berkompeten sebagai penyuluh pertanian. Tugas penyuluhan ini kian menjauhkan personel Babinsa dari tugas pokoknya sebagai pembina desa.

Anggota Komisi IV DPR Hermanto (Dapil Sumbar I) mengeritik tajam pengerahan Babinsa tersebut. Menurutnya, profesi penyuluh sebaiknya diserahkan kepada ahlinya yang berkompeten. Ia meminta Presiden Joko Widodo meninjau ulang kebijakan ini.

“Untuk mewujudkan dan mempertahankan swasembada pangan



Anggota Komisi IV DPR Hermanto

menuntut kesungguhan dari semua pemangku kepentingan termasuk penyuluh pertanian. Kalau Babinsa ditunjuk sebagai penyuluh pertanian, maka ia juga dituntut untuk bersungguh-sungguh dalam profesi tersebut. Jika Babinsa bersungguh-sungguh dalam profesi itu maka sangat mungkin tugas utamanya sebagai pembina desa akan terabaikan,” papar Hermanto dalam siaran persnya, Selasa (20/1).

Selain tidak berkompeten, pengerahan Babinsa sebagai penyuluh pertanian juga menyalahi aturan. Anggota F-PKS ini mengemukakan, Peraturan Kepala Staf TNI AD Nomor 19/IV/2008 tertanggal 8 April 2008, seorang Babinsa wajib melaksanakan pemi-

naan teritorial sesuai petunjuk atasannya, yaitu komandan Komando Rayon Militer (Koramil).

Tugas pokok mereka, lanjut Hermanto, mengumpulkan dan memelihara data aspek geografi, demografi, hingga sosial, dan potensi nasional di wilayah kerjanya. Data yang dikumpulkan meliputi banyak aspek antara lain sumberdaya alam, sumberdaya manusia, sarana-prasarana, dan infrastruktur di wilayah binaannya.

Tugas itu saja belum tentu dijalankan dengan baik. Apalagi kini diserahkan tugas baru sebagai penyuluh pertanian. “Banyaknya konflik yang terjadi di masyarakat merupakan indikator bahwa tugas Babinsa belum dijalankan

secara optimal. Adanya konflik menunjukkan bahwa mereka belum optimal dalam mengelola data masyarakat untuk kepentinganantisipasi konflik,” ungkap Hermanto lagi.

Dengan tugas baru ini dikhawatirkan, Babinsa tidak profesional lagi bekerja. Tidak profesional sebagai penyuluh, tidak profesional juga sebagai personel Babinsa. “Apakah Presiden mau aparat negara tidak profesional,” kilahnya. Soal kekurangan 20 ribu penyuluh pertanian, sebaiknya pemerintah mengangkat lagi tenaga bantu penyuluh yang ada. “Mereka sudah berpengalaman bertahun-tahun sebagai penyuluh. Kalau masih ada kekurangan, tinggal meningkatkan ke-

mampuan mereka dengan pendidikan dan pelatihan,” papar Hermanto.

Seperti diketahui, sebelumnya TNI AD dan Kementerian Pertanian telah menandatangani MoU pada 7 Januari 2015 yang berisi kerja sama penyuluhan. Para Babinsa dikerahkan membantu para petani di desa untuk membangun dan meningkatkan kualitas hasil pertanian. Melalui MoU itu, sekitar 50.000 personel Babinsa di Indonesia digerakkan membantu kelompok tani.

Selain penyuluhan, kerja sama ini meliputi pendistribusian bibit, pupuk, peralatan pertanian, hingga membantu perbaikan waduk. (mh), foto : riska arinindya/parle/hr.

DPR Sahkan Penetapan Kembali Mitra Kerja Komisi-komisi



Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto didampingi Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua Fadli Zon

Rapat paripurna DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR Agus Hermanto Selasa (20/1) berhasil mengesahkan penetapan kembali mitra kerja Komisi-komisi DPR. Pengesahan ini diwarnai interupsi sejumlah anggota yang menghendaki dikaji lebih dalam lagi, namun karena saran anggota FPD Mulyadi bahwa komisi-komisi segera akan membahas RAPBN Perubahan 2015, maka akhirnya penetapan mitra kerja komisi tersebut akhirnya disetujui.

Penetapan kembali mitra kerja ini dilakukan karena ternyata kementerian Kabinet Pemerintahan Presiden Jokowi

mengalami perubahan seperti Kementerian Lingkungan Hidup dijadikan satu dengan Kementerian Kehutanan dan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Pada Pemerintahan SBY, Kementerian LH, Kehutanan dan Kementerian Ristek serta Pendidikan diatur dalam kementerian tersendiri.

Dengan penetapan itu ada satu Kementerian yang berpasangan dengan dua Komisi DPR yaitu, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bermitra kerja dengan Komisi II dan V DPR. Kemudian Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan bermitra kerja dengan Komisi IV dan Komisi VII DPR. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi bermitra kerja dengan Komisi VII dan Komisi X DPR.

Selengkapnya, Komisi II bidang tugasnya Dalam Negeri, Setneg dan Pemilu, sementara mitra kerjanya Kemendagri, Kemensetneg, Kemen Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kemen PAN/RB, Sekkab, Ombudsman RI, KPU, Bawaslu, BKN, LAN dan Arnas RI.

Komisi V infrastruktur dan Perhubungan, mitra kerjanya Kemen.PU, Kemenhub, BKMG, Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional, Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo dan Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura.

Komisi IV lingkungan hidup dan pertanian, pangan serta maritim, mitra kerjanya Kementan, Kemen. Kelautan dan Perikanan, Bulog serta Dewan Maritim Nasional.

Komisi VII Energi dan Ristek, mitra kerjanya Kemen ESDM, BPPT, Badan Tenaga Nuklir, Bapeten, BPKH Migas, SKK Migas, Lapan, LIPI, Lembaga Eijkman, DRN, DEN dan Pusat Peragaan Iptek.

Komisi X pendidikan, olah raga dan sejarah, mitra kerjanya Kemendikbud, Kemen. Pariwisata, Kemenpora dan Perpustakaan Nasional. (mp)/foto:iwan armanias/parle/iw.



Anggota Komisi X DPR Jefirstson Riwu Kore

Pencapaian Target Wisatawan Jangan Hanya Angan

dua hal yang penting, yaitu anggaran dan kebijakan. Terkait dengan anggaran, dalam APBN, Kementerian Pariwisata setidaknya hanya dianggarkan sebesar Rp 1 triliun. Namun, anggaran untuk pariwisata hanya di kisaran Rp 500 miliar, dan disebar ke seluruh Indonesia.

“Bagaimana mau mendapatkan wisman dan wisnus kalau tidak ada promosi? Ini kan bohong-bohongan saja. Padahal kami kepada pemerintah sudah keras dan tegas, harus diberikan anggaran yang cukup untuk pariwisata. Pemerintah selama ini tidak memperhatikan anggaran pariwisata. Tidak mau mengeluarkan anggaran, tapi maunya hanya mendapat keuntungannya saja,” tegas Jefirstson.

Politisi asal Dapil Nusa Tenggara Timur ini menambahkan, dari sisi kebijakan, banyak yang tidak mendukung program pariwisata. Contohnya, mengenai surat edaran larangan mengadakan rapat di hotel bagi PNS dari Menpan RB, yang sangat berimbas kepada industri pariwisata.

“Ini kan soal efisiensi, tapi bukan berarti mematikan semuanya. Cukup penjarakan saja bagi pegawai yang suka melakukan *mark up* biaya rapat. Ini perlu kita bicarakan dengan mitra kerja. Yang perlu kita perbaiki adalah anggaran dan kebijakan. Kalau kita dapat perbaiki kedua hal itu bersama, kita dapat capai target itu. Tapi kita juga harus realistis,” imbuhnya.

Sementara sebelumnya, Ketua Umum DPP Indonesia *Congress and Convention Association* (INCCA) Iqbal Alan Abdullah. Menyatakan, dibutuhkan kerja keras untuk dapat mencapai

target tersebut.

“Pencapaian target kunjungan 20 juta wisatawan 2019 sulit dicapai jika tanpa kerja keras dan sinergi antara pemerintah dengan industri. Kita tidak bisa mengandalkan satu sektor saja, ini harus dilakukan simultan antara pemasaran, pengembangan destinasi, penguatan dunia usaha serta sumber daya manusia pariwisata,” jelas Iqbal.

Untuk mendorong lebih banyak kunjungan wisman, pihaknya mengusulkan *Visit Indonesia Year* untuk tahun 2016, 2017 dan 2018 sebagai *trigger* untuk mempromosikan pariwisata Indonesia.

Iqbal menambahkan, jenis wisata MICE (*Meetings, Incentives, Conferencing, Exhibitions*), merupakan jenis wisata yang sangat potensial untuk dikembangkan di Indonesia. Pasalnya, setidaknya 40 persen wisatawan yang datang ke Indonesia bermotif bisnis atau *meeting*. Namun, selama ini dukungan pemerintah belum optimal.

“Di Amerika Serikat, industri MICE ini lebih besar daripada industri otomotif dan transportasi udara. Kita punya peluang besar disini,” imbuhnya.

Untuk itu, pihaknya mengusulkan perlunya peningkatan status Direktorat MICE di Kementerian Pariwisata menjadi Direktorat Jenderal (Ditjen) MICE, sehingga perhatian terhadap industri ini bisa lebih besar lagi.

“Hal ini sangat dibutuhkan dunia usaha untuk dapat bertumbuh sehat terutama dalam menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat dengan era liberalisasi saat ini,” harap Iqbal. (sf), foto : naefurodjie/parle/hr.

Pemerintah menargetkan kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2019 mencapai 20 juta. Padahal, di tahun 2014 hanya tercapai 9,5 juta wisatawan. Sementara, untuk wisatawan nusantara ditargetkan dapat melampaui 275 juta, dimana pada tahun 2014 tercapai 250 juta wisatawan.

Namun, target yang cukup tinggi itu mendapat sorotan dari Anggota Komisi X Jefirstson Riwu Kore. Ia menilai, angka yang ditargetkan ini tidak realistis, dan hanya menjadi angan saja. Demikian diungkapkannya, saat rapat dengan sejumlah *stakeholder* bidang pariwisata, di Gedung Nusantara I, Senin (20/01).

“Pencapaian target wisatawan mancanegara yang aneh. Kenapa aneh, sekarang saja cuma 9,5 juta. Bagaimana mau mencapai 20 juta wisman? Dapat dari mana angka 20 juta itu? Apa itu hanya angan? Tidak realistis itu. Saya pikir ini suatu yang aneh. Padahal infrastruktur dan anggaran juga tidak ada,” tegas Jefirstson.

Politisi Demokrat ini menambahkan, agar target dapat tercapai, diperlukan

Farid Dilantik Melengkapi Kursi Pimpinan Komisi VI

Farid Al Fauzi dari Fraksi Hati Nurani Rakyat (Hanura) ditetapkan menjadi salah satu Wakil Ketua Komisi VI DPR. Dengan demikian, kursi pimpinan Komisi VI sudah lengkap, dan sesuai dengan perubahan Undang-undang No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3).

Penetapan tersebut dilaksanakan dalam rapat intern

Komisi VI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Agus Hermanto, di ruang rapat Komisi VI, Gedung Nusantara I, Selasa (20/1). Rapat telah memenuhi kuorum, dengan menghadirkan perwakilan masing-masing fraksi.

“Pimpinan Komisi terdiri satu Ketua dan paling banyak empat Wakil Ketua, yang dipilih oleh dan dari Komisi. Untuk



Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto menyerahkan palu kepemimpinan kepada Hafisz Tohir

memenuhi Pimpinan Komisi VI, Ketua rapat mengusulkan musyawarah untuk mufakat, setuju?” tanya Agus kepada

seluruh Anggota Komisi VI. Jawaban “setuju” pun dilontarkan oleh seluruhnya.

Pada rapat Komisi VI pada tanggal 29 Oktober 2014 lalu, tambah Politisi asal Dapil Jawa Tengah 1 ini, Komisi VI telah menetapkan Pimpinan Komisi VI yaitu Ketua Komisi VI Hafisz Tohir (F-PAN), dengan didampingi Wakil Ketua Komisi VI yaitu Azam Azman Natawijana (F-Demokrat), Heri Gunawan (F-Gerindra), Dodi Reza Alex Noerdin (F-PG).

“Guna memenuhi paket Pimpinan Komisi yang diatur dalam Pasal 97 Ayat 2 UU No 42 tahun 2014, Pimpinan Komisi IV akan ditambah satu Wakil Ketua. Yang mengajukan satu Wakil Ketua adalah Partai Hanura, yaitu saudara Farid Al Fauzi. Apakah paket pimpinan ditambah satu dari Partai Hanura ini dapat disetujui?” tanya Politisi Demokrat ini.

Jawaban “Setuju” pun kembali dilontarkan Anggota Komisi VI yang hadir. Acara pelantikan diakhiri dengan penyerahan palu Pimpinan kepada Ketua Komisi VI. (sf), foto : naefurodjie/parle/hr.

Eksekusi Mati Terpidana Narkoba Sudah Benar

Pelaksanaan hukuman mati bagi terpidana narkoba yang baru-baru ini dilakukan, sudah benar dan tidak melanggar hukum, karena di dalam Peraturan Perundang-undang di Indonesia memang ada aturan hukuman mati.

Demikian dikatakan anggota Komisi III DPR H.M. Ali Umri, sesaat sebelum rapat paripurna DPR Selasa, (20/1) siang.

Ali Umri mengatakan, kalau memang Indonesia tidak akan melaksanakan hukuman mati Undang-Undang yang ada harus di cabut terlebih dahulu. Menurutnya, Jaksa dan Hakim dalam memutus eksekusi tersebut pasti dilaksanakan, karena sudah diatur dalam Undang-Undang dan hukuman mati bagi terpidana dianggap pantas dan setimpal dengan perbuatannya.



Anggota Komisi III DPR H.M. Ali Umri

Politisi Fraksi Nasdem ini mengatakan, di negara manapun juga pasti akan melakukan dengan hal yang sama dan tidak mungkin dibantah dan diatur

melalui payung hukum. Apalagi masalah narkoba sudah sangat luar biasa dan darurat di Indonesia.

Menyinggung masalah grasi ini adalah hak dan wewenang Presiden, kalau Presiden tidak mau memberikan itu hak Presiden. Pemberian grasi itu bisa melihat kasusnya berat atau ringan, manakala sudah berat karena sebagai pengedar dan dari dalam penjara juga melakukan hal seperti itu, ini sudah sangat membahayakan.

Terkait dengan penarikan Dubes Belanda dan Brazil yang ditarik oleh negaranya itu merupakan dampak dari persoalan tersebut. Akan tetapi jika nanti pemerintah memberikan penjelasan dan adanya kerjasama antar negara, diharapkan akan memahami penjelasan kongkrit oleh pemerintah. (Spy), foto : iwan armanias/parle/hr.

Perangi Narkoba, Suatu Keniscayaan Karena Sudah Darurat

Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengatakan, munculnya reaksi sejumlah negara yang warga negaranya dieksekusi hukuman mati atau yang akan menyusul dieksekusi, hal itu masalah kedaulatan hukum dan politik. “Bagi Indonesia perang terhadap narkoba suatu keniscayaan, karena situasinya sudah darurat narkoba. Indonesia bukan lagi negara transit akan tetapi sudah dikirim menjadi negara produsen untuk narkoba,” katanya sebelum menghadiri

Rapat Paripurna DPR Selasa (20/1).

Mahfudz menegaskan, sikap konsisten dan sikap tegas pemerintah yang sudah diambil ini, harus terus ditunjukkan apapun reaksi politik dari negara-negara tersebut.

Yang paling penting, lanjut politisi PKS ini, bagaimana pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri terus melakukan komunikasi diplomasi yang baik, sehingga mereka dapat memahami posisi Indonesia. Kalau setelah itu, mere-



Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq

ka akan tetap bereaksi keras itu merupakan konsekuensi yang harus berani tanggung oleh pemerintah.

Bahkan menurut dia, terlalu naif kalau satu negara kemudian mengurangi bobot hubungan bilateralnya atau bahkan memutuskan hubungan bilateral, hanya karena gara-gara ada warga negaranya yang terlibat tindak pidana kriminal luar biasa dan dieksekusi di negara lain.

Meski demikian, Indonesia juga harus siap kalau suatu waktu ada warga negaranya yang terlibat kasus narkoba dan misalnya harus dihukum mati di negara yang lain. “Berarti kita juga harus siap, meskipun kita akan terus melakukan upaya-upaya pembelaan secara hukum dan politik,” tambahnya.

Menurut Pimpinan Komisi yang membidangi luar negeri, dalam praktek diplomasi penarikan Duta Besar itu ada beberapa tingkatan. Pertama untuk pemanggilan konsultasi, dan yang kedua adalah untuk penarikan sementara, dan yang ketiga adalah tingkat tertinggi pemutusan hubungan diplomatik.

Yang dilakukan oleh negara Belanda dan Brasil, ujar Mahfudz, sebetulnya lebih memberikan pulang untuk konsultasi, hal ini merupakan praktik yang biasa dilakukan dalam diplomasi. Dan hal ini tidak usah terlalu dipersoalkan, karena dianggap wajar dan kita juga akan melakukan hal yang sama apabila ada warganya yang terlibat kasus seperti ini.

Pemerintah sudah benar sepanjang bisa menjaga konsistensi, akan tetapi jika konsistensinya tidak bisa dijaga misalnya dengan Australia, Cina, dan Amerika maka pemerintah sekarang sedang menggali kuburannya sendiri. “Jika pemerintah tidak konsisten dengan segera Indonesia akan dituduh diskriminatif dalam penegakan hukum,” ungkap Mahfudz Siddiq. (spy), foto : naefurodjie/parle/hr.

Larangan Rapat PNS di Hotel Perlu Dievaluasi

Komisi X menilai, surat edaran dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang melarang Pegawai Negeri Sipil untuk mengadakan rapat di hotel, perlu dievaluasi. Pasalnya, akibat dari larangan ini, banyak pihak yang dirugikan, terutama hotel dan restoran.

Hal ini menanggapi masukan dari segenap stakeholder bidang pariwisata, saat Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komisi X, dengan pembahasan utama mengenai pariwisata Indonesia.

Stakeholder yang hadir diantaranya Badan Promosi Pariwisata Indonesia (BPPI), Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA), Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), dan Indonesia Congress and Convention Association (INCCA).

“Kebijakan Kemenpan RB terkait larangan PNS menggelar rapat di hotel, perlu dievaluasi. Memang secara umum, kebijakan itu baik, namun larangan itu perlu dievaluasi, agar ada satu kebijakan yang tidak merugikan sektor pariwisata,” kata Ketua Komisi X Teuku Riefky Harsya, di Gedung Nusantara I, Senin (19/01/2015).

Untuk itu, tambah Politisi asal Dapil Aceh 1 ini menambahkan, pihaknya menerima masukan tersebut, dan akan segera membahasnya dengan Kementerian Pariwisata, dalam waktu dekat.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Badan Pimpinan Pusat Perhimpunan Hotel & Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi menyatakan, kebijakan Pemerintah melarang PNS rapat di hotel bertentangan dengan tujuan pelayanan tugas utama



Ketua Komisi X DPR Teuku Riefky Harsya saat memimpin RDPU

hotel kepada publik, termasuk PNS.

“Artinya hotel dan restoran terbuka untuk melayani masyarakat, termasuk PNS. Dengan adanya larangan tersebut, dipastikan bisnis perhotelan akan terpuruk, dan merugikan ribuan karyawan yang bekerja di hotel. Dalam konteks ini, pengusaha hotel keberatan dengan kebijakan tersebut,” jelas Hariyadi.

Padaahal, imbuhnya, hotel telah memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan negara. Malah, dibeber-

apa daerah, memberikan Pendapatan Asli Daerah sangat besar untuk daerah seperti Bali dan Jakarta.

“Oleh karena itu, kebijakan pemerintah tersebut sangat berpengaruh terhadap okupansi hotel dan secara langsung maupun tidak langsung sangat mengurangi pendapatan negara, bahkan kemungkinan ribuan karyawan hotel akan menjadi pengangguran,” imbuhnya.

Jika alasan pemborosan sebagai dasar larangan tersebut, Hariyadi menyatakan, ini tidak terlalu relevan. Menurutnya, yang terpenting adalah bagaimana komitmen moral para

PNS untuk mengelola keuangan negara melalui pendekatan, perencanaan yang cermat, dapat dipertanggungjawabkan, efektif, efisien, dan berdaya guna untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi dan kelompok.

“Kesimpulannya, PHRI sangat keberatan dengan adanya kebijakan larangan PNS rapat di hotel tersebut. Oleh karena itu, seluruh hotel dan karyawan mengimbau kepada pemerintah untuk membatalkan dengan meninjau kembali kebijaksanaan yang merugikan perkembangan hotel tersebut,” harap Hariyadi. (sf), foto : naefurodji/parle/hr.

Komisi VIII Apresiasi Kinerja BNPB

Anggota Komisi VIII DPR RI, Ahmad Fauzan mengapresiasi kinerja BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana). Hal tersebut diungkapkannya disela-sela rapat kerja Komisi VIII dengan Kepala BNPB, Senin (19/1) di Senayan Jakarta.

“Setelah mendengar langsung laporan dan evaluasi dari Kepala BNPB, saya sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan BNPB selama ini. Misalnya saja, hasil pemeriksaan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) sejauh ini saya anggap baik, terbukti dengan diterimanya predikat WTP (wajar tanpa pengecualian) yang merupakan peringkat tertinggi. Selain itu ada 185 temuan dengan 322 saran tindak lanjut, walaupun baru diselesaikan sekitar setengahnya,” jelas Ahmad.

Tidak hanya itu, menurut Ahmad Fauzan telah banyak usaha-usaha perbaikan yang terus dilakukan BNPB terkait dengan penanggulangan dan penanganan bencana. Diantaranya dengan pembentukan forum pengurangan resiko bencana (PRB) dimana sosialisasinya meliputi DPRD, Bappeda (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah), BPBD (badan penanggulangan bencana daerah) serta melaksanakan bimbingan teknis peta resiko bencana. Selain itu BNPB juga telah melaksanakan peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana satuan reaksi cepat penanggulangan bencana, serta berbagai program lainnya.

“Bencana merupakan kehendak Allah SWT yang tidak dapat dihindari, namun penanganan dan penanggulangan yang baik akan meminimalisir dampak dari bencana. Meski masih ada kekurangan dalam pelaksanaannya, namun saya



Anggota Komisi VIII DPR Ahmad Fauzan

melihat BNPB berusaha untuk selalu meningkatkan usaha-usaha perbaikan, bagaimana implementasinya? Kami akan selalu mengawasi kinerja BNPB dengan melihat langsung hasil kerjanya di lapangan (di masyarakat),” tambah Politisi dari Dapil DKI Jakarta I ini. (Ayu), foto : zul/parle/hr.

Komisi IV Setuju Anggaran Subsidi Pupuk dan Benih 2015

Komisi IV DPR RI menyetujui alokasi dana program dan rencana kerja Kementerian Pertanian dalam APBN 2015 sebesar Rp 15,8 triliun. Selain itu, diungkapkan Ketua Komisi IV DPR, Edhi Prabowo juga disetujui anggaran subsidi pupuk sebesar Rp. 35,7 Triliun dan subsidi benih sebesar Rp. 939 Milyar.

Edhi juga mengungkapkan Komisi IV juga menerima usulan tambahan dana alokasi khusus Kementerian Pertanian 2015 sebesar Rp 4 triliun. Dana

sebesar ini untuk rehabilitasi dan pengembangan jaringan irigasi tersier, pengembangan sumber air tanah dan parit serta pembangunan rehabilitasi jaringan usaha tani.

“Selain itu juga kita terima usulan pagu Kementan tahun 2015 sebesar Rp16 triliun yang dialokasikan untuk pencapaian swasembada padi, jagung dan kedelai,” kata Edhi usai memimpin rapat kerja dengan Menteri Pertanian, Senin, (19/1), di Gedung Parlemen, Ja-



Ketua Komisi IV DPR Edhi Prabowo

karta.

Politisi Partai Gerindra ini juga mengungkapkan Komisi IV mendorong peningkatan produksi daging, gula,

cabai, bawang merah dan komoditas pertanian unggulan lainnya. “Hal itu sama pentingnya untuk kedaulatan rakyat. Jadi saat ini kita mendorong

Kementerian Pertanian untuk segera merealisasikan,” pungkasnya. (as), foto : naefurodjie/parle/hr.

Ketua DPR Terima Aspirasi Gubernur Papua



Ketua DPR RI Setya Novanto berjabat tangan dengan Gubernur Papua

Ketua DPR RI Setya Novanto menerima kedatangan Gubernur Papua Lukas Enembe yang menyampaikan aspirasi perlunya revisi UU no.21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Usulan tersebut akan menjadi bahasan pada saat DPR membahas Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

“Iya saya menerima usulan dari Pak Gubernur dan akan saya teruskan ke-

pada alat kelengkapan dewan terkait. Saat ini kita sedang mempersiapkan Prolegnas, tentu ini akan menjadi bahasan apakah bisa menjadi bagian dari Prolegnas,” katanya dalam pertemuan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (19/1/15).

Dalam pertemuan tersebut Ketua DPR didampingi sejumlah anggota dewan lintas fraksi yang berasal dari

daerah pemilihan Papua. Peggi Patricia Pattipi dari Fraksi PKB mengaku siap mengawal RUU yang sebenarnya sudah masuk Prolegnas periode sebelumnya, hanya saja belum dapat diselesaikan.

“Saya rasa revisi UU Otsus ini sangat positif untuk kemajuan Papua kita, saya siap mengawal agar proses pengusulan dan pembahasannya bisa berjalan lancar,” kata Peggi yang pada periode ini kembali bertugas di Komisi V.

Gubernur Papua yang datang didampingi oleh sejumlah pengurus Majelis Rakyat Papua dan anggota DPRD mengatakan usulan revisi disampaikan setelah mempelajari sejumlah kelemahan pada produk legislasi sebelumnya. Dalam kesempatan itu ia juga menyerahkan draf revisi usulan yang sudah diselesaikan sejumlah pakar dan akademisi di Papua.

“Kedatangan menemui Ketua DPR untuk meminta arahan sekaligus meminta agar mengawasi agenda ini, kita juga akan bertemu pimpinan fraksi, Komisi II dan Baleg menyampaikan aspirasi ini,” demikian Lukas. (iky), foto : naefurodjie/parle/hr.

Lasarus Dilantik Jadi Wakil Ketua Komisi V DPR



Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto didampingi Pimpinan Komisi V saat Penetapan Pimpinan baru

Anggota DPR dari Fraksi PDIP Lasarus kembali terpilih menjadi Wakil Ketua Komisi V DPR yang membidangi perhubungan, pekerjaan umum perumahan rakyat dan pembangunan desa dan kawasan tertinggal.

Lasarus merupakan anggota DPR dari Fraksi PDIP untuk Dapil Kalimantan Barat dengan perolehan suara sebesar 173.154 suara. Dirinya merupakan putra dayak yang pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat pada periode 2004-2009.

“Apakah semua bisa setuju,” tanya Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto saat memimpin pemilihan pimpinan Komisi V DPR RI, di Gedung Nusantara, Senin, (19/1). Kemudian dijawab serentak, “setuju” oleh seluruh anggota Komisi V

DPR.

Pada kesempatan itu, Anggota DPR Yoseph Umar Hadi (Fraksi PDIP) mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Dewan atas dilantiknya pimpinan Komisi V DPR. “Saya yakin

dengan lengkapnya alat kelengkapan dewan dapat meningkatkan kinerja Komisi dan dapat memperjuangkan amanah rakyat,” terangnya. (si) foto : riska arinindya/parle/hr.

Komisi III Himpun Masukan dalam Seminar

Komisi III DPR RI menggelar acara seminar sehari dengan tema Outlook Penegakan Hukum 2014 dan Upaya Perbaikan Kinerja di Tahun 2015. Kegiatan ini sebagai upaya refleksi terhadap proses penegakan hukum selama tahun 2014 serta memikirkan agenda penegakan hukum pada tahun 2015.

“Seminar dirancang melibatkan pemikiran dari anggota Komisi III, mitra kerja, pakar, mahasiswa, LSM dan wartawan. Hasil pembahasan menjadi masukan umum bagi Komisi III dan mitra kerjanya,” kata Ketua Komisi III Aziz Syamsudin, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (22/1/15).

Seminar dibuka secara resmi oleh Ketua DPR RI Setya Novanto yang sekaligus sebagai pembicara kunci. Turut hadir menyampaikan materi Jaksa Agung H.M. Prasetyo, Plt Kapolri Komjen Pol Badrodin Haiti, praktisi hukum Asep Iwan Iriawan dan sebagai penanggap pakar hukum Prof. DR. Andi Hamzah.

Dihadapan mitra kerja lain yang hadir, Aziz menyampaikan hajat besar komisi yang dipimpinnya untuk segera menuntaskan revisi UU KUHP dan KUHP. Ia berharap sejumlah masukan dapat dijangar dalam seminar yang dilaksanakan di ruang Pustakaloka, Nusantara IV ini.

“Kita telah sepakat dengan Menkumham pembahasan RUU KUHP dan KUHP akan mulai dibahas pada bulan Maret. Harapannya semua pihak memberikan masukan,



Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsudin berdialog dengan Ketua DPR dan Plt. Kapolri

targetnya paling lambat 2015 inshaAllah sudah bisa kita selesaikan,” tutur dia.

Sementara itu anggota Komisi III dari FPKS Aboebakar Alhabsy menyampaikan kekecewaannya karena Pimpinan KPK yang diundang sebagai pembicara berhalangan hadir. “Saya kecewa KPK tidak datang. Aneh KPK tidak datang, kok bisa forum sebesar ini tidak datang. Di mana letak penghargaan terhadap lembaga negara,” tandasnya. (iky) foto andri/parle/hr

Komisi IX DPR Soroti Dualisme Pelayanan TKI

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Nasdem Irma Suryani Chaniago menyoroti masalah masih adanya dualisme pelayanan perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja RI (Kemenaker) dan BNP2TKI.

“Saya melihat ada dualisme dalam rangka pelayanan perlindungan TKI antara BNP2TKI dan Kementerian Tenaga Kerja. Kemenaker melalui Dirjen Binapentanya dan BNP2TKI melalui Deputi Perlindungannya,” kata Irma saat rapat kerja Komisi IX dengan Menteri Tenaga Kerja (Menaker) dan Kepala BNP2TKI dipimpin Ketua Komisi IX Dede Yusuf Macan Efendi di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (22/1/2015)



Anggota Komisi IX DPR Muhamad Ali Taher Parasong

Hal ini menurutnya, menyebabkan masalah ketika TKI ada masalah. Mereka (TKI) bingung mau kemana mengadu, mereka harus pergi ke kedua tempat ini.

“Tadi Pak Menteri mengatakan kita akan masuk kedalam satu pintu, namun dalam paparannya Kepala BNP2TKI juga membuat rencana Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP). Mana yang harus diutamakan, apakah BNP2TKInya atau Kemenaker-nya. Jangan dua-duanya bekerja dengan maksud yang sama,” papar Imra.

Ia mengingatkan bagaimana BNP2TKI dibentuk dimana untuk melakukan pemberdayaan, perlindungan dan penempatan TKI. Dirinya mengajak Mena-



ker dan Kepala BNP2TKI untuk duduk bersama, menyelesaikan masalah ini, karena ini juga menyangkut biaya.

Irma menegaskan persoalan buruh utamanya adalah bagaimana pemerintah terhadap ketersediaan lapangan kerja yang cukup serta keberpihakan pemerintah kepada buruh, jaminan kerja, asuransi, perlindungan hukum, kesejahteraan, dan ketahanan sosial buruh.

Sependapat dengan Irma, Muhamad Ali Taher Parasong (F-PAN) mengusulkan Kementerian Tenaga Kerja untuk fokus dengan masalah TKI di dalam negeri, sementara BNP2TKI fokus pada masalah TKI di luar negeri.

Sementara, Okky Asokawati (F-PP) mengenai adanya tumpang tindih tupoksi dari Kemenaker dan BNP2TKI mengingatkan bahwa Kemenaker telah mengeluarkan Permenaker Nomor

22 Tahun 2014 tentang pelaksanaan penempatan dan perlindungan TKI di Luar Negeri dimana diatur mengenai pembagian kewenangan antara Kemenaker dan BNP2TKI.

“Bagaimana keberadaan Permenaker ini, apakah keberadaan Permenaker ini masalah koordinasi antara Kemenaker dengan BNP2 TKI dapat berjalan dengan baik,” tanya Okky. (sc)

foto: naefurodji/parle/hr

BNPB Diminta Tingkatkan Koordinasi Dengan Pemda

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ledia Amalia Hanifa menilai masih kurangnya koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan Pemerintah daerah dalam pembentukan sebuah kebijakan yang terkait dengan rencana tata ruang wilayah. Hal tersebut diungkapkannya disela-sela rapat kerja dengan Kepala BNPB dan jajarannya, Senin (19/1) di ruang rapat Komisi VIII, Senayan Jakarta.

“Dari evaluasi ini saya melihat kurangnya koordinasi BNPB dengan pihak terkait lainnya seperti Pemerintah Daerah dibawah Kementerian Dalam Negeri. Hal ini tentu akan menjadi beban yang berat bagi BNPB sendiri, pasalnya ada beberapa kebijakan yang saling bertentangan,” jelas Ledia.

Dicontohkannya, ketika dalam Undang-undang Penanggulangan Bencana No.24 tahun 2007 menyatakan bahwa siapa yang melakukan pembangunan yang beresiko menyebabkan bencana, maka akan mendapat



Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ledia Amalia Hanifa

sanksi hukuman penjara enam tahun atau denda sanksi lainnya. Sementara setiap Pemda memiliki Perda masing-masing terkait tata ruang wilayahnya.

“Disaat BNPB menegakkan undang-undang penanggulangan bencana, Pemda memiliki kebijakan sendiri terkait Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Ini sangat memberatkan

BNPB, terlebih lagi tidak sedikit Pemda yang hanya mengandalkan bantuan dari pusat (BNPB) ketika terjadi bencana. Ditambah tidak semua daerah memiliki BPBD (badan penanggulangan bencana daerah) yang notabene di bawah Pemerintah daerah,” papar Ledia.

Oleh karena itu, Politisi dari Fraksi PKS Dapil Jawa Barat I berharap BNPB dapat meningkatkan koordinasi dengan semua pihak termasuk Kementerian Dalam Negeri yang membawahi pemerintah daerah, untuk mengkomunikasikan hal yang terkait dengan penanggulangan bahkan pencegahan bencana. Sehingga ke depan beban penanggulangan bencana tidak hanya tertumpu pada BNPB saja, melainkan juga ada kewajiban dari Pemerintah Daerah. Bahkan bukan tidak mungkin dalam membuat kebijakan RTRW Pemda juga dapat mendiskusikannya dengan BNPB. (Ayu)/foto:iwan armanias/parle/iw.

Pengrajin Tempe Tahu Keluhkan Tata Niaga Kedelai

Para pengrajin tempe dan tahu nasional mengeluhkan aturan tata niaga kedelai yang berlaku saat ini. Pengadaan kedelai kini diatur oleh pasar bebas, sehingga kerap kewalahan dengan harga kedelai yang melambung tinggi. Peran Bulog mesti dikembalikan untuk mengatur tata niaga kedelai.

Demikian mengemuka dalam pertemuan antara delegasi Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) dengan Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto, Senin (19/1). Hadir dalam pertemuan tersebut dua Wakil Ketua Komisi VI DPR Heri Gunawan (Dapil Jabar IV) dan Farid

Al Fauzi (Jatim XI). Ketua Gakoptindo Aip Syarifuddin yang memimpin delegasi, menyatakan, para pengrajin tempe tahu sedang terpuruk akibat pola tata niaga kedelai.

Yang menjadi persoalan, kata Aip, Perpres No.32/2013 yang dahulu memberi peran kepada Bulog untuk mengamankan harga dan menyalurkan kedelai, kini justru tak diberlakukan lagi. Padahal, Perpres tersebut telah membuat para pengrajin merasa nyaman. Ironisnya, yang menyingkirkan Perpres tersebut justru SK Menteri Perdagangan yang waktu itu dijabat Gita Wirjawan. SK itu menegaskan peran Bulog.

Para pengrajin merasakan harga bahan baku tempe tahu



Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto saat menerima Gakoptindo

berupa kedelai sangat mahal. Ini lantaran harganya didapat dari mata rantai penjualan yang sangat panjang. Akibatnya, harga yang sampai ke pengrajin sangat mahal. Mestinya para pengrajin mendapatkan harga tersebut langsung dari importir. Kini, untuk mencari kedelai lokal saja sangat

susah. Menurut Aip, bila kini pemerintah mencanangkan swasembada kedelai, tampaknya akan sulit tercapai.

“Jumlah kebutuhan kedelai nasional kira-kira antara 2,5-2,7 juta ton per tahun. Dari jumlah itu 1,8 juta ton (80%) diserap oleh pengrajin tempe tahu. Sisanya dibuat oncom, tauco, kecap, susu kedelai, dan lain-lain,” ungkap Aip.

Sementara itu, Agus Hermanto menyatakan, pemerintah harus mengembalikan peran Bulog untuk mengatur tata niaga kedelai. Lahan-lahan kedelai harus segera disiapkan termasuk menentukan harganya yang memadai. “Gakoptindo merasa masih sulit mendapatkan kedelai, karena terombang ambing oleh harga. Dulu pengadaannya dibuat mudah dengan membuat bea masuk 0%. Tahu tempe yang sehari-hari kita makan itu harus sustainable,” harap Agus.

Sementara Heri Gunawan menyampaikan, komisi yang dipimpinnya segera akan membahas persoalan tata niaga kedelai ini bersama Menteri Perdagangan Rahmat Gobel yang dijadwalkan akan menggelar rapat kerja dengan Komisi VI pada 2 Februari mendatang. Ini akan menjadi pembicaraan serius antara DPR dan pemerintah. (mh)/foto:iwan armanias/parle/iw.

RAPBNP 2015: Pertumbuhan Ekonomi 5,8%, Inflasi 5% dan Harga Minyak 70 Dolar

Rapat kerja Badan Anggaran DPR dipimpin Ketuanya Achmadi Noorsupit Senin (19/1) di Gedung DPR beragendakan pembahasan RAPBN-Perubahan 2015. Hadir dalam acara ini dari pemerintah Gubernur BI Agus Martowardojo dan enam orang Menteri.

Keenam Menteri tersebut adalah Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Hukum dan HAM Yasona H Laoly, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Andriano Chaniago, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dan Menteri ESDM Sudirman Said.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dalam kesempatan ini menyampaikan pokok-pokok perubahan APBN 2015, dimana pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8 persen, inflasi 5 persen, tingkat suku bunga SPN 3 bulan sebesar 6,2 persen dan nilai tukar dipatok Rp 12.200/dolar. Selain itu harga minyak mentah Indonesia turun dari 105 dolar/barel menjadi 70 dolar, lifting minyak juga turun dari 900 ribu barel/hari menjadi 849 ribu barel serta lifting gas turun dari 1.224 ribu barel setara minyak perhari menjadi 1.117 ribu barel setara minyak perhari.

Dalam RAPBN-P 2015 ini, kata Menkeu, Penerimaan Negara Bukan Pajak



Suasana Rapat Kerja Badan Anggaran DPR

(PNBP) turun Rp 129,3 T dari APBN 2015 karena turunnya asumsi ICP dan target lifting migas. Karena langkah-langkah optimalisasi target produksi mineral dan batubara serta peningkatan tarif royalti akan meningkatkan target PNBP.

Yang juga mengalami penurunan yaitu penerimaan laba BUMN sebesar Rp 9 triliun menjadi Rp 34,95 T untuk menjaga keseimbangan antara investasi BUMN guna memacu pembangunan. Selain itu diupayakan perbaikan regulasi dan peningkatan di bidang PNBP.

Dengan kondisi itu, lanjut Menkeu, penerimaan perpajakan migas (PPH migas) turun menjadi 50,9 T dari sebelumnya 88,7T. Kemudian yang meningkat adalah pajak non migas dari APBN

2015 sebesar 1.113 T menjadi 1.244,7 T dalam RAPBN-P 2015. Sektor kepabeanan dan cukai juga meningkat dari 178,3 T menjadi 188,9 T pada RAPBNP 2105.

Sebelumnya Menkeu Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemerintah memiliki alasan yang cukup kuat untuk mengubah APBN warisan pemerintahan SBY pada bulan Januari ini. APBN 2015 yang ada sekarang bersifat *baseline* atau hanya untuk menjalankan fungsi-fungsi dasar pemerintahan dan disusun oleh pemerintahan lama. “Pemerintahan baru harus segera menjalankan visi dan misi melalui perubahan RAPBN-P ini,” ia menambahkan. (mp)/foto:iwan armanias/parle/iw.

Komisi IV Pertanyakan Menurunnya Sejumlah Indikator Pertanian



Ketua Komisi IV DPR Edhi Prabowo

Raker Kerja pertama Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian Amran Sulaiman, yang dipimpin Ketua Komisi Edhi Prabowo, membahas beberapa isu terkait menurunnya indikator pertanian.

“Sektor Pertanian di Indonesia menghadapi tantangan yang berat. Hal ini terlihat dari capaian indikator makro pertanian tahun 2014,” kata Edhi Prabowo, saat memimpin Raker ini, Senin (19/1), di Gedung Parlemen, Jakarta.

Beberapa indikator mengalami penurunan, yaitu indikator penyerapan tenaga kerja sebesar 35,77 juta orang yang turun sebesar 0,78% dibanding tahun 2013, capaian indikator Nilai Tu-

kar Petani (NTP) sebesar 102,04 yang turun sebesar 2,81% dibanding tahun 2013.

Selain itu capaian neraca perdagangan pertanian sebesar US\$ 11,17 Milyar pada bulan September 2014 turun sebesar 30,10% dibanding tahun sebelumnya. Walaupun untuk capaian Produk Domestik Bruto (PDB) Pertanian tahun 2014 hingga triwulan III naik sebesar 0,66% dibanding tahun 2013 menjadi 3,03%.

“Meskipun demikian, Komisi IV memberikan apresiasi kepada Pemerintah terhadap realisasi anggaran Kementerian Pertanian sebesar Rp.12,725 Triliun dari total pagu sebesar Rp.14,230 Triliun atau sebesar 89,42%,” katanya.

Selanjutnya, untuk mendukung capaian swasembada padi, jagung, dan kedelai pada tahun 2015-2017 sebagaimana yang diamanatkan Presiden RI Joko Widodo, Kementerian Pertanian akan melakukan kegiatan percepatan tanam dan optimasi lahan.

Pelaksanaan program percepatan tersebut direncanakan menggunakan anggaran yang berasal dari Dana Kontingensi Stabilisasi pangan 2014. Namun demikian, terdapat perbedaan rincian kegiatan antara usulan awal Menteri Pertanian kepada Komisi IV DPR, mengenai Dana Kontingensi 2014.

“Sehubungan dengan hal tersebut, Komisi IV meminta kepada Pemerintah

untuk memberikan penjelasan terkait penggunaan Dana Kontingensi Stabilisasi Pangan tersebut,” tanya dia.

Pada kesempatan ini Komisi IV mempertanyakan salah satu agenda nawacita, untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, termasuk di dalamnya peningkatan kedaulatan pangan.

Untuk mendukung program tersebut, Kementerian Pertanian tahun 2015 merencanakan program kerja dengan pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp. 15,879 Triliun, serta rancangan subsidi pupuk dan benih yang memiliki anggaran masing-masing sebesar Rp. 35,703 Triliun dan Rp. 939,412 Milyar.

Komisi IV juga minta penjelasan Pemerintah mengenai usulan alokasi dari Kegiatan APBN-Perubahan Kementerian Pertanian 2015 sebagai upaya khusus program percepatan pencapaian swasembada padi, jagung, dan kedelai, serta usulan kegiatan dan kebutuhan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pertanian tahun 2015.

“Komisi IV meminta penjelasan secara mendetail mengenai rencana kerja dan arah kebijakan pertanian tahun 2015-2019,” ungkap Edhi Prabowo. (as) foto : naefurodije/parle/hr.

Turunnya BBM Bisa Dorong Kegiatan Ekonomi Rakyat

Anggota Komisi VII DPR Kurtubi mendukung kebijakan pemerintah yang kembali menurunkan harga BBM premium dan solar. Untuk jenis premium dari Rp7.600 menjadi Rp6.600 per liter dan solar dari Rp7.250 per liter menjadi Rp6.400 per liter.

“Saya termasuk yang berpendapat jika harga minyak dunia turun, maka harga BBM dalam negeri juga turun, meskipun sebelumnya sudah diturunkan. Dengan begitu rakyat bisa me-

nikmati harga BBM dunia yang sedang rendah, dan hal itu mendorong kegiatan ekonomi rakyat. Pada gilirannya bisa menghemat pengeluaran uang rakyat serta meningkatkan daya beli,” kata politisi Partai Nasional Demokrat sehubungan kebijakan pemerintah yang menurunkan kembali harga BBM berlaku mulai Senin (19/1).

Hal serupa kata Kurtubi, pernah terjadi tahun 1986, dimana harga minyak dunia turun tetapi harga BBM



Anggota Komisi VII DPR Kurtubi



dalam negeri tidak segera diturunkan, sehingga pemerintah memperoleh keuntungan dengan menjual BBM, keuntungan ini disebut laba bersih jual BBM.

Demikian pula dengan harga saat ini yang menyentuh pada kisaran 40 dolar per barel, harga jula BBM dalam negeri ini sudah untung. Keuntungannya lari kemana, ke APBN namanya laba bersih minyak. “Agar rakyat bisa menikmati harga minyak dunia yang sedang turun, saya berpendapat harga BBM dalam negeri juga ikut diturunkan, meski kemarin sudah turun,” ungkapnya.

Selanjutnya menurut pengamat migas ini, kesempatan pemerintah sekarang menyusun kebijakan harga untuk harga BBM bersubsidi dalam jumlah yang tetap. “Yang kita dengar solar

diberikan subsidi Rp 1.000 perliter. Itu sudah bagus, nah untuk jenis premium, sekarang ini sudah tidak disubsidi dan pemerintah sekarang sudah untung,” ia menjelaskan.

Ke depan, seandainya harga minyak dunia melonjak lagi katakanlah melonjak tiga kali lipat sampai 100 dolar lagi, pada saat itu DPR akan berpendapat, akan usulkan agar premium diberikan subsidi tetapi tidak seperti dulu. Untuk tahun 2015, harga minyak dunia relatif akan tetap rendah, mungkin naik sedikit tidak sampai 100 dolar, maka ia berpendapat premium sudah tidak disubsidi lagi.

Diingatkan, minyak mentah yang keluar dari perut bumi hanya 400 000 barel.hari, padahal kebutuhan dalam negeri 1,6 juta barel perhari. Hanya seperempatnya yang dipenuhi oleh

produksi dalam negeri, sisanya impor. “Nah ini rakyat perlu diinformasikan bahwa kondisi minyak kita tidak seperti dulu lagi. Sehingga kalau subsidi dikurangi atau dihapuskan seperti premium ini, dananya bisa dialihkan untuk infrastruktur,” paparnya.

Menanggapi rekomendasi Tim Pemberantasan Mafia Migas, untuk secara bertahap menghapus premium dan beralih ke Pertamina, Kurtubi menyatakan mendukung. Dia meminta lebih realistis tidak bisa buru-buru. Artinya, menurut Kurtubi, kita harus menunggu Pertamina mampu memproduksi Pertamina. “Jangan sampai kita berhenti mengimpor premium, tetapi beralih impor Pertamina dalam jumlah besar, sama juga bohong,” pungkasnya. (mp)/foto:iwan armanias/parle/iw.

Pimpinan DPR Terima Menko Kemaritiman



Ketua DPR RI Setya Novanto dan Wakil Ketua Taufik Kurniawan saat berdialog dengan Menko Kemaritiman

Pimpinan DPR terdiri Ketua Setya Novanto dan Wakil Ketua Fadli Zon dan Taufik Kurniawan, Rabu (21/1) di Ruang Rapat Pimpinan DPR Gedung Nusantara III menggelar pertemuan dengan Menko Kemaritiman Dwisuryo Indroyono Susilo. Dalam pertemuan

tersebut Menko memaparkan program pembangunan di bidang maritim yang menjadi salah prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Sesuai pertemuan, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menjelaskan, dalam pertemuan itu pemerintah meminta

dukungan DPR dan tentu saja Dewan mendukung program-program yang dicanangkan seperti konektivitas penjagaan laut dari *illegal fishing* (pencurian ikan), pemanfaatan perikanan tangkap dan budi daya.

“Saya kira itu program-program pembangunan yang bagus termasuk pembangunan pelabuhan, mudah-mudahan ini segera terealisasi bukan hanya sekedar satu keinginan saja. Untuk itu DPR mendukung sebab pasti bagus bagi Indonesia dan bagi rakyat, jika benar-benar terealisasi,” ujarnya.

Ditambahkan Pimpinan Dewan dari Fraksi Gerindra ini, kedatangan Menko juga untuk menjelaskan program Poros Maritim Dunia, sebagai hal yang bagus apalagi dua pertiga wilayah Indonesia terdiri dari lautan. “Kita dukunglah,” paparnya.

Sementara bentuk dukungan DPR, antara lain dari sisi anggaran dan perundang-undangan serta kebijakan. Yang paling mendesak seperti pembangunan-pembangunan pelabuhan untuk budi daya perikanan sebagai prioritas dan memerangi *illegal fishing*. (mp), foto : iwan armanias/parle/hr.



Ketua DPR RI Setya Novanto menerima Dirjen Badan Tenaga Atom Internasional HE Yukiya Amano, Kamis (22/01) Foto: Iwan Armanias/Parle/Hr



Rapat Bangkar bahas RAPBNP 2015 dengan Menkeu dan jajaran Menteri Kabinet Kerja, Selasa (20/01) Foto: Andri/Parle/Hr



Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dipimpin oleh Ketua Komisi XI Fadel Muhammad dengan Menkeu, Gubernur BI, Kepala Bappenas, dan Kepala BPS, Kamis (22/01). Foto: Naefurodji/Parle/Hr

